

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prospektif Hukum Progresif*. Jakarta: SinarGrafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Pustaka Yustisia.
- Apong Herlina, dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Bambang Supriyono. 2012. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas II B Nusa Kambangan*. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bismar Siregar. 1992. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. 2005. *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kartini Kartono. 2013. *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (pemberian abolisi dalam perkara mantan presiden Soeharto Tidak Logis, benarkah itu?)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.

- Muhammad Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: UII Press.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: ustaka Pelajar.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Putra A. Bardin.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Sri Widoyanti. 1984. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Terbuka Bahasa.
- Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*. Jakarta: Litera.
- S. M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

## B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. Jurnal

- Adey Ardhan Saputro. 2015. *Konsepsi Recterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*. Mimbar Hukum. 28(1): 64-65.
- Aska Yosuki. 2018. *Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama 1(1): 11.
- Aristo Evandy A. Barlian. 2017. *Formulasi Ide Permaafan Hakim Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*. Jurnal Law Reform. 13(1): 34.
- Chairul Huda. 1999. *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum. 6(12): 134.
- Didit Ferianto. 2013. *Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHP*. Lex Crimen. 11(4): 145.
- Setyo Langgeng. 2018. *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. 1(1): 139.

## D. Lain-lain

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2016. *Tinjauan atas Non-imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Bayu Dwi Putra. 2019. *Perumusan Alasan yang Meringankan dan Alasan yang Memberatkan Dalam Putusan Pidana Dikaitkan Dengan Straftmacht Penjatuhan Pidana*. Bogor: Pusdiklat Teknis Peradilan.
- Muhammad Iftar Aryaputra. 2013. *Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Tesis. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun RUU KUHP. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta.

<https://inspiratormedia.id/nasional/selama-2018-kpai-terima-4-885-pengaduan/>, diakses 24 September 2019, pukul 14.10.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/t55a79d5494464/yang-angkat-bicara-tentang-irechterlijke-pardon-i>, diakses 25 Mei 2020, pukul 10.22.